BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 91).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, menurut Clive Archer organisasi internasional juga merupakan suatu bentuk institusi dengan struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua

atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita & Yani, 2014 : 91-92).

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2009 : 3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Secara terperinci T. May Rudy memberikan penggolongan mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu, sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: Organisasi internasional antarpemerintah (intergovernmental organization/IGO) dan organisasi internasional nonpemerintahan (nongovernmental organization/NGO).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdangangan internasional dan lain-lain.
4. Rujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: Global-umum, global-khusus, regional-umum, dan regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): Organisasi supranasional dan organisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: Kerjasama pertahanan keamanan, dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi: Organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional, organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif, dan organisasi peradilan, yaitu: organisasi yang menyangkut

penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonoomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudy, 2005: 7-10).

2.1.2 Ekonomi Politik

Ekonomi politik internasional menjadi kajian dalam studi hubungan internasional sejak tahun 1970-an. Pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang di sebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, sehingga krisis ini menjadi awal timbulnya kesadaran para pemegang otoritas pemerintahan bahwa faktor ekonomi sangat penting dan menentukan proses politik. Pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta antara negara dengan pasar semakin diakui. Ekonomi politik internasional menurut Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of Internasional Relations*, secara umum adalah :

> ”Studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalahmasalah yang terjadi dalam sistem internasional” (Gilpin, 1987:3).

Pengkajian Ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya didalam masalah isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi. Sehingga dapat pula dinyatakan bahwa ekonomi poltik internasioanl sebagai berikut :

> ”ekonomi politik internasional adalah sebuah studi tentang masalah internasional yang terfokus pada elemen-elemenen interdepedensi kompleks yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari” (Spero, 1999:43).

Menurut Joan Edelman Spero, dalam bukunya yang berjudul *The politics of International Economic Relations.*

> ”Ekonomi politik internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya, maka sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional, pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi politik internasional” (Spero, 1985:10).

Lebih lanjut Spero mengemukakan bahwa ada empat cara faktor politik mempengaruhi ekonomi, yaitu:

> ”1) Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan opersi politik internasional. 2) Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi. 3) Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik. 4) Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non-negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan” (Spero, 1985:5).

Sumber diatas menjelaskan bahwa dalam Hubungan Internasional, selain menjalin hubungan antar negara untuk mencegah terjadinya konflik, juga dapat dilakukan hubungan yang positif lainnya dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Menurut T.May Rudy dalam bukunya Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional :

> ”Ekonomi Politik internasional memberikan dan menyediakan kerangkakerangka konseptual dalam menganalisis dan menampung kenyataankenyataan yang kompleks dan saling berkaitan menegenai berbagai masalah dalam Hubungan Internasional kontemporer” (May Rudy, 1992:52-53).

Berdasarkan teori diatas bahwa ekonomi politik internasional dapat menjadi sebuah konsep atau pemikiran dalam terjadinya hubungan internasional saat ini, karena ekonomi politik internasioanal terlah memberikan dan menyediakan kerangka-kerangka konseptual dalam menganalisis kenyataan hubungan internasional yang terjadi saat ini.

Menurut David N. Balaam dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Political Economy,* berpendapat bahwa :

> ”Ekonomi Politik Internasional adalah hubungan kerjasama antara negara-negara dalam kerangka produksi, distribusi kekayaan dan kekuasaan, investasi, dan lain-lain. Dalam tinjauan EPI bahwa perlu adanya pendekatan level analisis terhadap individu, negara, dan sistem internasional” (Ba1aam, 1996: 3).

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, ekonomi-politik internasional secara sederhana menjelaskan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi, yang didefinisikan sebagai dinamika interaksi antara pengejaran kekuasaan dan kekayaan.

Berbicara mengenai Ekonomi Politik Internasional tidak akan lepas membahas tentang Ilmu Ekonomi itu sendiri, menurut Samuelson Nordhaus dalam bukunya Ilmu Makro Ekonomi, Ilmu Ekonomi memiliki pengertian

”Kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas” (Samuelson, 2001:4).

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa tiap individu dapat memanfaat atau mengolah sumber daya yang ada untuk menjadi komiditas dalam berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga harus ada batasan dalam pengolaan sumber daya tersebut.

2.1.2.1 Bisnis Internasional

Bisnis internasional adalah semua transaksi bisnis-swasta dan pemerintah-yang melibatkan dua atau lebih negara. Bisnis internasional terdiri dari sebagian besar dan berkembang dari keseluruhan bisnis dunia. Saat ini, hampir semua perusahaan, besar atau kecil, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global dan persaingan karena output menjual sebagian atau pemasok aman dari negara asing dan bersaing dengan produk dan layanan yang berasal dari luar negeri pengertian bisnis internasional.

Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas -batas suatu negara, transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (*International Trade*). Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang

biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian.

1. Perdagangan Internasional (*International Trade*)

Merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul "Neraca Perdagangan Antar Negara" atau "*Balance Of Trade*".

2. Pemasaran Internasional (*International Marketing*)

Sering disebut sebagai Bisnis Internasional (*International Busines*) merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa (McCulloch : 2006).

Tahap-tahap Dalam Memasuki Bisnis Internasional :

1. Ekspor Insidentil (*Incident At Export*)

Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis Internasional suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.

2. Ekspor Aktif (*Active Export*)

Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan Internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap "ekspor aktif", sedangkan tahap pertama tadi disebut tahap pembelian atau "*Purchasing*" (Charles WH Hill : 2008).

Era Globalisasi yang melanda dunia pada saat ini dimana dalam kondisi itu tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang terbebas dan tak terjangkau oleh pengaruh dari Negara lain. Setiap Negara setiap saat akan selalu terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh Negara lain. Hal ini bisa terjadi karena pada saat ini kita berada dalam abad komunikasi, sehingga dengan cara yang sangat cepat dan

bahkan dalam waktu yang bersamaan kita dapat mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap Negara di manapun di dunia ini.

Dari keadaan itu maka seolah-olah tidak ada lagi batas-batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih bersifat sama. Dengan kecenderungan yang terjadi pada saat ini bahwa permintaan ataupun kebutuhan masyarakat di mana pun di dunia ini mendekati hal yang sama. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi atau untuk kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara negara yang satu dengan negara lain.

Kecenderungan untuk adanya kesamaan inilah yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara Internasional Perusahaan yang demikian akan mencoba untuk mencari tempat pabrik guna memproduksikan barang-barang tersebut yang paling murah dan kemudian memasarkannya keseluruh penjuru dunia sehingga akan menjadi lebih ekonomis dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Di samping itu adanya batasan-batasan ekspor-impor antar negara mendorong suatu perusahaan untuk memproduksikan saja barang itu di negeri itu sendiri dan kemudian menjualnya di negeri itu juga meskipun pemiliknya adalah dari luar negeri (Daniels, Radebaugh & Sullivan : 2004).

2.1.2.2 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. Undang – undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa : pengertian penanaman modal dalam undang – undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan – ketentuan undang – undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA), yaitu :

1. Teori R. Vernon

Vernon (1966) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk. Dalam model ini, introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar (Pandji Anoraga, 1995: 53).

Pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri, perusahaan mulai memikirkan

kemungkinan mencari pasar – pasar baru di negara – negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi – strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya komperatif.

Tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga risetan keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara – negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaga kerjanya masih lebih rendah. Produk – produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan di impor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk – produk inovatifnya.

2. Teori Stephen Hymer

Investasi langsung merupakan persoalan yang kompleks dan sulit dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja internasional dari perusahaan – perusahaan nasional. Menurut Hymer, invetasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa

atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional (Pandji Anoraga, 1995: 66).

Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh perusahaan induk. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Kemungkinan memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi akan timbul bila perusahaan memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang ada di negara tuan rumah. Keunggulan tertentu perusahaan dapat timbul karena adanya akses ke sumber modal yang lebih mudah dan besar, adanya pasar bahan mentah yang diproduksi dengan skala besar dan memiliki keahlian seperti keahlian manajemen, keterampilan pemasaran dan lain sebagainya.

Pemerintah pasti akan selalu berusaha agar arus modal yang masuk ke Indonesia semakin besar. Hal tersebut dibutuhkan untuk membiayai dana pembangunan yang semakin meningkat, terutama dalam hal pembangunan di bidang ekonomi. Sesuai dengan kebutuhan dana untuk pembangunan tersebut, maka pemerintah selalu berusaha untuk menarik dana investor asing dengan memberikan berbagai kemudahan melalui berbagai kebijaksanaan.

Penanaman modal asing dalam Undang – undang No.1/ 1967 adalah sebagai alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia,

yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Alat – alat untuk perusahaan termasuk penemuan – penemuan baru milik orang asing dan bahan – bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, selama alat – alat tersebut tidak dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang – undang ini diperkenankan ditransfer tetapi digunakan untuk membiayai kembali perusahaan di Indonesia.

2.1.2.3 Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksunya tetap sama (Sadono Sukirno 1996: 33).

Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi selain itu pembangunan juga di artikan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi juga berdasarkan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan 2002: 5).

Mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sadono Sukirno 1985:13)

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan

perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.(Suryana, 2000:5)

2.1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda, di satu pihak istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai kemakmuran yang lebih tinggi, seperti yang dikemukakan ”Michael Todaro”, pertumbuhan ekonomi atau yang populer juga disebut ”*Economic Growth*”, adalah suatu proses mantap dimana kemampuan berproduksi meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menaikkan tingkat pendapatan nasional (*National Income*) (Todaro, 1985:470).

Dipihak lain istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dihadapi suatu negara dapat dibedakan pada tiga aspek, yaitu:

Aspek pertama ; masalah pertumbuhan itu berasal dari perbedaan tingkat pertumbuhan potensial yang dapat dicapai, dan tingkat pertumbuhan yang dapat di

capai, dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai dari satu tahun ke tahun lain, sumber daya alam dalam suatu negara akan mengalami pertambahan. Pertambahan ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat Produksi ekonomi yang bertambah besar. Investasi dimasa kini akan menambah potensi suatu negara menghasilkan barang dan jasa. Di samping itu kemajuan teknologi memungkinkan sumber daya yang ada menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, selanjutnya perkembangan penduduk dan perkembangan produktivitas mereka juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi ke taraf yang lebih potensial, sebagai akibatnya pertumbuhan kemakmuran lebih lambat, pengangguran semakin besar dan masalah politik sosial semakin memburuk.

Aspek kedua ; mengenai masalah pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan itu sendiri, adakalanya pertambahan potensi dari kemampuan menghasilkan pendapatan nasional tidak mencukupi untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

Aspek ketiga ; mengenai keteguham pertumbuhan ekonomi yang berlakudari satu tahun ke tahuin yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi tidaklah berkembang secara liniear adakalanya perekonomian berkembang dengan pesat dan ada kalanya pergerakan lambat dan kadang-kadang berlaku mundur, yaitu tingkat kegiatannya lebih rendah dari sebelumnya (Sukirno,2000:13).

Pertumbuhan ekonomi dunia pada perdagangan dan uang menghubungkan bangsa-bangsa dalam jaringan interdepedensi membentuk penekanan antara politik domestik dalam pembuatan keputusan dan politik luar negeri untuk mencapai kesepakatan. Dengan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi, terjadi

pula perubahan mendasar tidak saja dalam hubungan ekonomi, melainkan juga dalam kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi berbagai unsur sosial masyarakat maupun lembaga politik dan sosial (Sicat, 1991:351).

Pertumbuhan ekonomi menurut Samuelson adalah ”menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi bangsa bergeser keluar” (Samuelson, 2001:249).

Dalam sebuah pertumbuhan ekonomi dikenal adanya empat roda pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dalam sebuah perekonomian, yaitu:

a) Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi)
b) Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan) Pembentukan modal (mesin, pabrik, jalan)
c) Teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan) (Samuelson, 2001:250).

Ditambahkan lebih jauh oleh Sukirno, teori pertumbuhan neo klasik meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perekembangan tiga faktor produksi, yaitu:

a) Pertambahan modal dan produktivitas modal
b) Pertambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
c) Perkembangan teknologi (Sukirno, 1981:437).

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Perwita dan Yani, menyebutkan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita & Yani, 2014: 95).

Sedangkan menurut T. May Rudy dalam buku Administrasi & Organisasi Internasional, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah pernanan penting, yaitu:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping* operation dan lain-lain) (Rudy, 2009: 27).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2.1.3.1 Multinasional Corperation

Perusahaan multinasional (PMN, mengacu pada multinational corporation atau MNC) menurut W. F. Schoel et. al. (1993) adalah sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara (disebut negara induk) dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (negara tuan rumah). (Puspopranoto, Sawaldjo, Hal 66)

Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah "sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan diluar negaranya sendiri (winardi, 1982). Perusahaan multinasional tersebut mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global dengan negara-negara tempat perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepaat serta memungkinkan bahwa dapat timbul konflik-konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroprasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan antara para ahli ekonomi paada tahun-tahun belakangan ini. (Anorogo, Panji, 2009 : 85)

S.C Certo (1997) memberikan batasan PMN sebagai "sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih satu negara". Jadi, PMN adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis di tingkat internasional. Ia menjalankan kegiatannya dengan skala internasional yang tidak memandang batas negara dan dipimpin oleh sebuah strategi bersama dari sebuahinduk (pusat) perusahaan. (Anorogo, Panji, 2009 : 85)

Walaupun PMN di seluruh dunia berbeda satu sama lain dalam hal volume penjualan, keuntungan, pasar yang dilayani, dan jumlah anak perusahaannya, akan tetapi mereka mengindikasikan beberapa sifat yang sama, yaitu :

1. Membentuk afiliasi di luar negri.
2. Beroprasi dengan visi dan strategi mendunia (*global*).
3. Kecendrungan untuk memilih jenis-jenis kegiatan bisnis tertentu.
4. Kecendrungan untuk menempatkan afiliasi di negara-negara yang maju di dunia.
5. Menempuh satu dari tiga strategi dasar yang bersangkutan dengan staffing. (Puspopranoto, Sawaldjo Hal 57)

Ada beberapa badan hukum yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dalam aktivitas operasinya, yaitu: (anorogo, Panji : 2009 : 86-87)

1.Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan multinasional induknya.

2. Perusahaan Subdiary (*wholly owned subdiary*)

Merupakan anak perusahaan yang berbadan hukum sendiri. Saham perusahaan ini sepenuhnya di miliki oleh perusahaan induknya.

3. Perusahaan Patungan

Merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.

4. Perusahaan *Go Public* atau *Public Company*

Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang masyarakat.

5. Perusahaan dengan bentuk lainnya

Pembentukannya yang didasarkan pada ketentuan perundangan yang ada, seperti di bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdaganngan ataupun jasa lainnya, (sumantoro, 1987).

Sedangkan menurut Rachmat Soemiro (1988), bentuk badan hukum perusahaan multinasional di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor atau usaha pusatnya (MNC induknya). Dengan demikian bukan merupakan badan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, menejemen, administrasi, keuangan, serta kebijakan yang dilaksanakan identik deengan MNC induk dan dikendalikan dari kantor pusat tersebut.

2. Subdiary

Adalah perseroan anak yang merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari perseroan induknya dan lazimnya didirikan berdasarkan

hukum yang berlaku di negara tempat pendirian. Perseroan induk biaasanya memiliki seluruh saham-saham subdiary, tetapi sering pula terjadi bahwa sebagian dari saham-saham itu dimiliki oleh perseroan lain di negara tempat pendirian seehingga terjadi joint-venture. (anorogo, Panji : 2009 : 86-87)

2.1.4 Teori peranan

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23).

Menurut ALexander Sindoro dalam buku Ensiklopedia Manajemen. Ia menjelaskan arti peranan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seorang dalam manajemen.
2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. (2001;55).

Jadi peranan merupakan bagian dari tugas utamanya yang harus dilakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok yang mempunyai hubungan sebab akibat. Peranan (role) merupakan proses dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson mengatakan peranan mencakup 2 hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2009:213)

David Berry mengemukakan bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. (Wirutomo, 1981 : 99 – 101)

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

2.1.5 Teori Paradiplomasi

Isu hubungan internasional bergeser dari yang bersifat high politic seperti konflik dan perang yang cenderung mengedepankan hardpower ke isu-isu kerjasama (Rudi, 2003:2). Untuk menjamin hubungan kerjasama yang baik antar negara maka diperlukan cara sebagai sebuah proses dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nicolson (1974:89) memperjelas definisi tentang diplomasi yaitu :

a. *The management internal relation by means of negotiation*
b. *The method by which these relation are adjusted and manage by ambassadors and envoys*
c. *The business of art of the diplomatist*
d. *Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiation.*

Sejalan dengan pendapat tersebut diplomasi adalah “suatu cara komunikasi dengan pemilihan kata serta kalimat yang dilakukan berbagai pihak-pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang diakui untuk meraih kepentingan kita sendiri” (Partao, 2007:35). Jadi dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan upaya negara melalui cara berkomunikasi yang baik dengan wakil-wakil yang terpilih untuk merebut kepentingan nasional dengan jalan damai.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) merupakan salah satu bentuk investasi asing baik berupa penanaman modal maupun pendirian industri atau pabrik ke daerah-daerah tertentu di Indonesia. Investasi asing langsung adalah investasi di suatu negara yang berasal dari negara- negara melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang dimilki oleh pihak swasta (Todaro, 2000:250). Sementara itu, Fathonah (2010:163) mengatakan bahwa investasi asing langsung adalah suatu bentuk penanaman modal asing ke dalam aktifitas perekonomian negara lain. Investasi asing langsung biasanya berbentuk fisik misalnya pembangunan pabrik dan melibatkan partisipasi perusahaan. Selain itu, penanaman modal melalui investasi asing langsung ini juga bersifat jangka panjang.

Hal-hal yang berkaitan erat dengan investasi asing langsung memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan otonomi daerah dimana dalam proses pengelolaan investasi maka para investor akan berhadapan langsung dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut sehingga akan berdampak positif bagi proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebanyakan pelaku investasi

asing adalah perusahaan multinasional (MNC). Kehadiran MNC sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara dunia ketiga di mana MNC merupakan salah satu sumber modal yang penting bagi pembangunan ekonominya (Dougherty & Pfahzgraff, 1990:255).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional dalam bentuk investasi asing yang dilakukan oleh negara atau perusahaan swasta dalam kerangka otonomi daerah sangat berpeluang besar untuk memajukan daerah. Melalui pengelolaan secara bersama antara pemerintah daerah sebagai penyedia sumberdaya alam dan negara lain atau perusahaan sebagai penyedia modal dan teknologi, maka kemajuan pembangunan daerah akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, investasi asing merupakan wujud hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan investor asing dalam kerangka otonomi daerah.

Pada hakekatnya pelayanan pemerintah yang baik terhadap rakyatnya baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kredibilitas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan. Menurut Rasyid (1997:100), "paradigma pemerintahan harus didasarkan pada asumsi bahwa pemerintahan dalam jangkauan masyarakat menitikberatkan pada bentuk pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif serta produktif. Diperlukan payung hukum sebagai legalitas pemekaran daerah yang diberi tugas untuk mengelola daerah otonom.

Seperti yang sudah di tuliskan sebelumnya pemerintah Indonesia telah memiliki undang-undang otonomi daerah yang menyatakan bahwa daerah sebagai bagian sub-sistem dari Indonesia dan perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak dan legal untuk mengurusi daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensinya. Oleh sebab itu, dalam konsep tata pemerintahan daerah (local government) disebutkan bahwa otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Wewenang tersebut dimaksudkan supaya tercapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, yang menuju kepada tingkat kemandirian masyarakat daerah serta hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah (Suryaningrat, 1981:32).

Akan tetapi, seberapapun besarnya wewenang pemerintah daerah yang diamanatkan oleh konstitusi tetap saja pemerintah daerah menjadi sub-sistem negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pelaku hubungan kerjasama internasional dalam bentuk investasi asing hanya bisa sampai pada panandatangan MoU atau Letter of Intent. Itu artinya dalam kesepakan-kesepakan perjanjian yang lebih tinggi seperti perjanjian, traktat, atau konvensi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola kerjasama luar negeri pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Lura Negeri mempunyai wewenang untuk: memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri; mencari terobosan baru (inisiator) menyediakan data yang diperlukan (informator) mencari mitra kerja di luar negeri

mempromosikan potensi daerah di luar negeri (promotor) memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri (fasilitator) dan memberi perlindungan kepada daerah (protector) (Arsyad dan Masrie, 2010:8).

Akan tetapi, pemerintahan daerah harus mengarahkan pemerintahanya pada sejumlah hal yakni transformasi diri dari *bureaucratic monopolistic government menjadi entrepreneurial-competitive government,* pemerintahan yang menjadi *customers –driven government* dan *accountable government*. Osborne (dalam Kertajaya & Yuswohady, 2005:4-5), menyebut pemerintahan seperti ini adalah *"put the costumers in the driver 's seat".* Di samping itu, pemerintah daerah perlu membangun pemerintahan berwawasan global atau *global-cosmopolite orientation.* Pemerintahan berwawasan global dilaksanakan dengan membangun konsep 3C versi Moss Kanter yakni *Concept* yakni pemerintah daerah harus punya ide inovatif dalam mempromosikan daerahnya, *Competence* yakni pemerintah daerah harus berani memposisikan diri sebagai produsen yang memiliki *quality, cost and delivery*, dan *Connection* yakni pemerintah daerah harus membangun networking sebanyak mungkin baik dalam negeri maupun luar negeri (Kertajaya & Yuswohady, 2005:4-5).

Meskipun demikian, otonomi daerah mengandung kontradiksi internal. Dengan wewenang yang diberikan undang-undang pemerintah daerah menggunakan kekuasaan untuk menguras habis uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri dan melakukan korupsi selama berkuasa, sehingga menciptakan

raja-raja kecil di daerah yang memiliki otoritas yang tidak bisa dibendung dan membuat daerah justru semakin rusak dan rencana pembangunan *buttom–up* pasti dipastikan gagal total atau demokrasi lipstik dan menikmati ‘mastubrasi politik’ (Surwandono, 2014:40).

Oleh sebab itu, butuh kesadaran mutlak dari semua elemen masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk saling mendukung menciptakan Indonesia yang sejahtera adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam konstitusi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap aktor negara pasti akan melakukan interaksi dengan aktor lainnya dalam hubungan internasional guna untuk menjalin hubungan. Hal tersebut pasti terjadi mengingat suatu negara tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri.

Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi yang mempelajari mengenai interaksi lintas negara. Namun dalam perkembangannya hubungan internasional saat ini semakin kompleks, dimana interaksi tidak hanya dilakukan antar negara saja melainkan juga melibatkan aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan hingga sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Aktor-aktor lain tersebut salah satunya adalah *International Non-Governmental Organization* (INGO), interaksi yang melintasi batas negara membuat batasan-batasan politik tidak lagi menjadi penghalang dalam hubungan internasional.

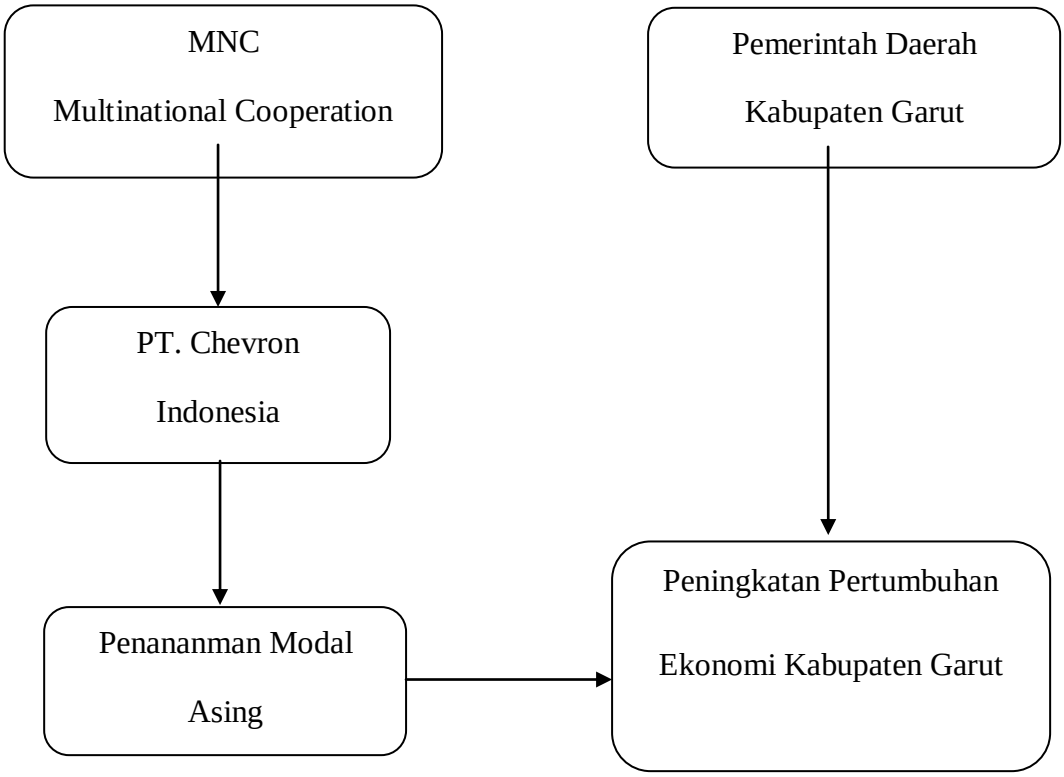
Sistem internasional saat ini mulai berubah arah sejak berakhirnya Perang Dingin, dimana tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat high-politics seperti keamanan, militer, perang dan politik untuk menguji seberapa besar kekuatan negaranya terhadap negara lain. Namun, sistem internasional saat ini mulai bergeser kepada isu low-politics seperti lingkungan hidup, ekonomi, Hak Asasi Manusia, terorisme, dan juga termasuk pendidikan.

Ekonomi sebagai salah satu kebutuhan universal bagi manusia merupakan kekuatan yang cukup netral dan efektif dalam mempengaruhi suatu bangsa dalam melihat sebuah taraf kemakmuran tertentu dari suatu pihak. Hal ini dikarenakan Ekonomi merupakan proses kemampuan berproduksi yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan nasional.

Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas perekonomian di negaranya demi menciptakan kemakmuran. Indonesia sebagai suatu negara memiliki berbagai permasalahan di dalam dunia ekonomi, sehingga hal ini menarik aktor-aktor *non-state* seperti PT.Chevron untuk berkontribusi dalam mengatasi hal tersebut.

Dilihat dari perspektif perubahan kualitas ekonomi, PT.Chevron memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi di Indonesia dengan menjadi konsultatif bagi negara untuk menentukan arah kebijakan dengan melihat interaksi yang terjadi dengan masyarakat sekitar secara langsung.

Secara lebih rinci, kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran